

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Efektivitas Program Pendampingan Sosial Ekonomi Pascabencana di Kabupaten Pandeglang

Program pendampingan sosial ekonomi pascabencana dilaksanakan sebagai upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat agar mampu bangkit dan mandiri setelah terjadi bencana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program pendampingan sosial ekonomi pascabencana belum berjalan secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas program pendampingan sosial ekonomi pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemahaman program pendampingan sosial ekonomi pascabencana pada tim pelaksana, BNPB menunjukkan hasil yang efektif. BNPB dan Tim pelaksana memahami proses/alur program pendampingan sosial ekonomi, sedangkan pemahaman program pada kelompok masyarakat perlu ditingkatkan. Kelompok masyarakat memahami program pendampingan sosial ekonomi merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka memulihkan masyarakat terdampak bencana, tidak mengetahui alur proses pendampingan secara detail.
- b. Sasaran program pendampingan sosial ekonomi merupakan masyarakat terdampak bencana. Dalam pelaksanaan program, ketepatan sasaran program dapat disimpulkan sangat efektif, hal ini ditunjukkan dari laporan pelaksanaan kegiatan dan observasi yang dilakukan.
- c. Program pendampingan sosial ekonomi pascabencana di Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan oleh BNPB bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Dapat disimpulkan indikator ketepatan waktu sudah efektif.

- d. Tujuan kegiatan pendampingan sosial ekonomi belum tercapai, hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator tercapainya tujuan kurang efektif. Bahkan setelah program bantuan sosial dan ekonomi mulai berjalan, jelas bahwa kementerian dan aparat daerah lainnya, lembaga masyarakat dan bisnis, serta pihak-pihak terkait lainnya belum sepenuhnya mendukung upaya untuk mengembalikan kegiatan sosial ke jalur yang benar di zona bencana.
- e. Perubahan nyata pada kelompok masyarakat kegiatan pendampingan ekonomi tidak efektif. Hal ini terlihat, tidak adanya keberlanjutan usaha kegiatan pendampingan ekonomi.

5.1.2 Faktor Yang Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Program Pendampingan Sosial Ekonomi Pascabencana di Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hasil pembahasan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pendampingan sosial ekonomi Pascabencana di Kabupaten Pandeglang antara lain :

- a) Faktor pendukung efektivitas program pendampingan sosial ekonomi ialah koordinasi dan kerja sama BNPB dengan tim pelaksana, adanya sosialisasi program, adanya pengawasan/monitoring oleh BNPB, dan kapasitas Sumber Daya Manusia/Tim Pelaksana.
- b) Faktor penghambat efektivitas program pendampingan sosial ekonomi pascabencana di Kabupaten Pandeglang antara lain dukungan pemasaran produk yang belum optimal, belum adanya peraturan teknis yang menjadi dasar dukungan Pemerintah Daerah, karakteristik penerima program pendampingan, dan adanya pandemik Covid-19.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dalam perbaikan program pendampingan sosial ekonomi yang dilaksanakan di Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi. Pertama, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pimpinan BNPB maupun organisasi sejenis dalam melaksanakan kegiatan pendampingan sosial ekonomi. Pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial ekonomi perlu memperhatikan aspek pemasaran produk. Keberlanjutan kelompok usaha pendampingan ekonomi dipengaruhi oleh

pemasaran produk yang baik. Tim pelaksana kegiatan dapat menyusun kajian pemasaran produk dan BNPB dapat mendukung pemasaran melalui berbagai media dan sarana agar produk dapat dipasarkan.

Kedua, bagi pembuat kebijakan pada level pusat yaitu BNPB, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk merumuskan peraturan teknis yang mengatur peran Pemerintah Daerah dalam melanjutkan kegiatan mendorong dukungan dari Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya. Tidak adanya peraturan teknis yang mengatur peran pemerintah daerah menyebabkan efektivitas program pendampingan sosial ekonomi menjadi terbatas. Program yang seharusnya bersifat berkelanjutan cenderung berhenti pada tahap awal atau tidak berkembang lebih lanjut. Dampak positif yang telah dicapai selama masa pendampingan berisiko tidak bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan peraturan teknis yang jelas dan operasional menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan sosial ekonomi. Peraturan teknis ini dapat menjadi turunan dari Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017. Regulasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, memperkuat kelembagaan, serta membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program.

Ketiga, penelitian ini memberikan gambaran bahwa karakteristik penerima program menjadi hal penting. Penerima program yang merupakan sasaran utama, sehingga BNPB dan tim pelaksana perlu mengatur agar dalam tahap pembentukan kelompok, perlu melakukan assesment terhadap kesiapan dan komitmen dalam melanjutkan program pendampingan sosial ekonomi. Program yang tidak disesuaikan dengan kapasitas, kebutuhan, dan kondisi sosial penerima manfaat berpotensi menghasilkan capaian yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

5.3. Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan penelitian dan rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini BNPB dan stakeholder terkait.

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada lima indikator dalam menilai aspek efektivitas. Sehingga kedepannya diharapkan penelitian sejenis dengan indikator efektivitas yang berbeda.

2. Bagi pihak instansi (BNPB, BPBD, dan Kelompok usaha)

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat sejumlah saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan sosial ekonomi pascabencana di masa mendatang, khususnya dalam konteks wilayah yang terdampak bencana seperti Kabupaten Pandeglang.

Untuk meningkatkan keberlanjutan program bantuan sosial-ekonomi dan memulihkan serta meningkatkan aktivitas sosial di daerah yang terkena bencana, disarankan agar BNPB terus memperkuat regulasi teknis mengenai peran pemerintah daerah. Hal ini akan membantu program mencapai tujuannya, yang meliputi pelibatan kementerian/lembaga, aparat daerah lainnya, masyarakat, dan lembaga bisnis secara lebih aktif.

Selain itu, perlunya perbaikan tahapan program dalam mengkaji karakteristik penerima program yang dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemandirian sehingga terwujud perubahan nyata, perlu adanya fasilitas pemasaran produk kelompok masyarakat dalam sentra produk wisata atau media *e-commerce*.